

# Dinamika Politik Kaum Muda Indonesia: Dialektika Politik Nasional dan Lokal

Syarifuddin Jurdi

Dosen Prodi Sosiologi Politik UIN Alaudin Makasar

Alamat email: syarifip@yahoo.com

## Abstract

*Young people have a high contribution in the development national politics situation of nation, including in Indonesia. The founding fathers of our nation, when they proclaimed independence, they were still young. They are extraordinary person who has integrity to our country for freedom of Indonesia. This article will discuss the contribution of young people in economics and politics situation and their action in globalization. The dominant actions are to make empowerment in community as political action. It means that political actions are not interpreted as pragmatic, but also have a lot of advantage to society. They do everything to avoid the pragmatic politics actions in order to uphold moral ethics of politics. They will do high political actions, self balancing, visionary and religious.*

**Keywords;** *young people, politic, moral, patronage*

*Nabi geram kepada penguasa yang zalim*

Nabi bersabda:

*“Jauhilah pintu-pintu penguasa dan kaki tangannya,  
Karena orang yang paling dekat dengan pintu penguasa dan  
Kaki tangannya adalah yang paling jauh dari Tuhan”.  
Tetapi ia juga memuji penguasa yang adil, Beliau bersabda:  
“Di antara yang dilindungi Tuhan pada hari ketika tidak ada  
perlindungan kecuali perlindungan-Nya adalah penguasa yang adil.  
Penguasa adalah bayangan Tuhan di bumi. Dengan kekuasaannya  
orang lemah dilindungi dan orang-orang tertindas dibela”*

(Majalah Ummat No. 4/Thn. 11/4 Rabiul Akhir 1417 H)

## Pendahuluan

Dalam sejarah yang panjang, peran pemuda dalam perpolitikan Indonesia telah mengalami dialektika dengan berbagai konteks sosio-kultural yang dihadapinya, jauh sebelum Indonesia merdeka, pemuda telah memperlihatkan partisipasi politik yang tinggi sebagai manifestasi dari keinginan untuk membebaskan diri dari belenggu kolonialisme dan imperialisme Barat. Peran pemuda dalam politik Indonesia abad ke-20 merupakan fenomena khas kaum muda. Meluasnya kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan, industrialisasi dalam batas-batas tertentu, urbanisasi, disintegrasi masyarakat primitif, teknologi berkembang dengan cepat telah menunjukkan dengan baik bahwa perubahan-perubahan pada ranah struktur sosio-kultural telah membentuk kurang lebih apa yang disebut dengan nilai-nilai "rasional", inilah yang menjadi dasar bagi gerakan politik kaum muda.

Rasionalisasi nilai-nilai tradisional telah membawa keguncangan bagi sebagian masyarakat terutama pada masyarakat yang bersifat tertutup dan primitif, khususnya terhadap nilai-nilai baru, didukung oleh agama yang dipahami dan dipraktekkan bersifat konservatif, anti reformisme dan berbagai persoalan budaya yang ikut menentukan gerak awal kaum muda dalam politik Indonesia. Berdirinya Budi Utomo 1908<sup>1</sup> dengan mengusung isu yang berkaitan dengan persoalan kebangsaan, merupakan manifestasi dari

kesadaran rasionalisasi nilai-nilai perjuangan, dari hegemoni nilai-nilai paternalistik dan sikap pasrah kepada upaya rasionalisasi pemahaman, maka kemudian dari BO berdirilah Taman Siswa (Ki Hajar Dewantara/ Suwardi Suryaningrat) dan kemudian Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah. Tahun 1928, para pemuda pun bergerak pada ranah yang sama untuk membangun Indonesia merdeka,<sup>2</sup> tahun 1930-an, kaum muda semakin aktif dalam pergerakan politik nasional dengan berdirinya berbagai gerakan kebangsaan yang dimotori oleh kaum muda.

Memotret peran dan partisipasi politik kaum muda dalam pentas perpolitikan Indonesia sangat penting bagi upaya mencari jalan sebagai upaya memahami eksistensi politik kaum muda. Kini wacana pemimpin muda mencuat kembali dalam politik Indonesia, meski sebenarnya eksistensi politik kaum muda semakin menunjukkan grafik meningkat seiring dengan iklim politik yang semakin demokratis. Namun demikian, ada sejumlah pertanyaan yang perlu didiskusikan, bagaimana kiprah politik kaum muda dalam perpolitikan Indonesia? Apakah peran politik kaum muda sejalan dengan idealisme politik yang mereka perjuangkan? Apakah aktivisme politik kaum muda sebangun dengan cita-cita politik bangsa yang merdeka? Bagaimana sebaiknya partisipasi politik kaum muda dimanifestasikan? Pertanyaan pertama akan dijelaskan dengan menelusuri sejumlah kiprah kaum muda dalam perpolitikan Indonesia, sementara

<sup>1</sup> Berdirinya BO diprakarsai oleh beberapa siswa STOVIA (sekolah dokter). BO dikenal sebagai gerakan kebangkitan nasional pertama di Indonesia, meski sebelum BO telah ada Sarekat Dagang Islam (SDI tahun 1905) yang didirikan oleh Soemanhoedi dan kawan-kawan.

<sup>2</sup> Menurut beberapa sumber bahwa nama Indonesia untuk pertama diperkenalkan oleh Tan Malaka (Ibrahim Datuk Tan Malaka), karena itu Muhammad Yamin menyebut Tan Malaka dengan sebut "Bapak Republik Indonesia", Sokerano menyebutnya dengan "seorang yang mahir dalam revolusi. Nama Indonesia ditemukan dalam karya Tan Malaka yang berjudul *Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia)* 1925. jauh lebih dahulu dari Muhammad Hatta yang menulis *Indonesia Vrije (Indonesia Merdeka)* tahun 1928 di Den Haag Belanda dan Soekarno yang menulis *Menuju Indonesi Merdeka* 1933. Lihat Majalah *Tempo* edisi khusus, edisi 11-17 Agustus 2008.

pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan dijelaskan secara dialektis dengan kondisi sosio politik Indonesia, baik pada masa otoriter Orde Baru maupun pada era transisi politik pasca Orde Baru.

Dalam tulisan ini tidak bermaksud untuk menjelaskan secara lebih rinci dan mendetail mengenai peran politik kaum muda dan soal-soal politik terkait dengan kiprah mereka dalam politik Indonesia, juga tidak bermaksud menjawab seluruh pertanyaan di atas. Mengingat persoalan politik Indonesia tidak selalu bersifat mekanik dan linear, karena sejarah politik Indonesia memiliki kekhasan, adakalanya terjadi lompatan-lompatan dan kejutan-kejutan tertentu yang memungkinkan sistem politik dan sirkulasi kekuasaan dapat dilangsungkan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan semangat perubahan pada rezim politik, tetapi juga dalam rentan waktu yang panjang politik Indonesia ditentukan oleh segelintir elite berkuasa, baik era otoriter Demokrasi Terpimpin maupun era otoriter Orde Baru, peran personal – aktor utama negara sangat dominan.

### **Kaum Muda dalam Politik Indonesia: Perspektif Historis**

Generasi muda pra kemerdekaan telah menghabiskan waktu mereka untuk mengurus masalah-masalah yang murni bersifat politik, baik menyangkut kemerdekaan, melawan imperialisme dan gerakan-gerakan sosial lainnya – seringkali manifestasinya bersifat non-kooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda. Periode pra kemerdekaan, gerakan kaum muda diorganisir melalui berbagai wadah seperti Perhimpunan Indonesia (PI) pada tahun 1925. PI memiliki tujuan yaitu;<sup>3</sup> 1)

menyadarkan kaum muda dan mahasiswa agar mereka mengusahakan kemerdekaan Indonesia, karena mereka yang akan menjadi elite-elite bangsa apabila Indonesia merdeka; 2) menghilangkan kesan bahwa kemajuan sosial ekonomi rakyat Indonesia bukanlah atas kebaikan pemerintah kolonial Belanda; 3) menciptakan suatu ideologi gerakan yang kuat dan bebas dari pembatasan-pembatasan yang bersifat sektarian (Islam dan komunisme).

Gerakan politik kaum muda pra kemerdekaan memiliki cita-cita yang jelas dan idealisme yang kuat yakni mewujudkan Indonesia merdeka. Oleh sebab itu, gerakan politik kaum muda memiliki basis ideologi yang jelas dalam perpolitikan Indonesia;<sup>4</sup> *pertama*, kesatuan nasional. Upaya mencari kesamaan-kesamaan dengan menghilangkan perbedaan-perbedaan menjadi pilihan yang ditempuh kaum muda untuk membentuk aksi bersama melawan kolonialisme untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. *Kedua*, solidaritas. Suatu kesadaran nasionalis muncul bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara penjajah dengan jajahannya, karena itu kaum muda terdidik haruslah mampu menciptakan dan mempertajam konflik antara orang Indonesia dan penjajah. *Ketiga*, non-kooperasi. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Belanda atau kaum penjajah, tetapi berkat kerja keras dan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. *Keempat*, swadaya. Diperlukan adanya kekuatan yang mandiri dalam kehidupan nasional, ekonomi, sosial, politik, dan hukum.

Dimensi moralitas dan etika politik tampaknya sangat menonjol dalam “kontestasi” antareleman pemuda pada masa pra kemerdekaan, mereka memiliki kelebihan tertentu dan kemampuan pribadinya

<sup>3</sup> Lihat John Ingleson, *Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*, (Jakarta: LP3ES, 1982)

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 5

dalam mengorganisir kekuatan rakyat yang mungkin lahirnya keberanian untuk menghadapi kolonialisme Eropa. Pemimpin muda lahir dan berkembang dari masyarakat yang sedang bergolak melawan asing, mereka tidak muncul dari restu atau “permisi” berikan kami kesempatan, bukan juga penunjukkan, tetapi muncul dari kekuatan pribadi dan integritas moralnya yang kuat. Mereka sebagai *social of change* hadir sebagai jawaban atas politik imperialis tersebut.

Peran politik kaum muda yang diwadahi melalui PI pra kemerdekaan merupakan manifestasi dari problem sosial politik pribumi, tokoh muda yang menonjol selain Hatta, Soekarno, Tan Malaka, Sunarjo, Kahar Muzakir, Sutan Syahrir, Sukiman, Natsir, Kasman, Farid Ma’ruf, tetapi didukung oleh tokoh-tokoh senior seperti Tjokroaminoto, Agus Salim, Mas Mansur, serta tokoh BO seperti Ki Hajar Dewantara dan Tjipto Mangunkusumo. Mereka mengusung agenda politik yang progresif seperti menentukan nasib sendiri sebagai bangsa Indonesia, mewujudkan sistem demokrasi, kebebasan pers dan kebebasan berserikat, hak pilih yang bebas, pendidikan, pertanian yang lebih modern, perbaikan kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Kaum muda pada masa itu jauh lebih progresif bila dibandingkan dengan kaum muda pasca kemerdekaan.

Kemerdekaan dan kebebasan yang diperoleh masyarakat tidak terlepas dari kontribusi real kaum muda, pada usia yang masih sangat muda (30-an) Sutan

Syahrir telah menjadi Perdana Menteri pada akhir tahun 1940-an.<sup>5</sup> Bahkan dalam beberapa periode, pengaruh kelompok Syahrir dalam politik Indonesia sangat menonjol dan berperan penting dalam proses pengambilan kebijakan pada periode awal kemerdekaan, inilah apa yang disebut oleh Harold Laswell sebagai sekelompok kecil yang memperoleh sebagian besar dari nilai apa saja, mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik. Mereka memiliki reputasi politik yang dapat dipercaya, karena itu mereka memengaruhi dan menentukan posisi dalam institusi birokrasi, ekonomi, kekuasaan, dimana keputusan-keputusan penting yang menentukan arah bangsa diletakkan.

Kelompok Hatta, Soekarno dan Natsir pun memiliki pengaruh pada periode 1950-an, kecuali Hatta yang karena alasan-alasan moralitas dan etika politik, mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada dekade 1950-an akibat silang pendapat dengan Soekarno yang sudah semakin otoriter.<sup>6</sup> Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, peran kaum muda *nyaris* hilang, kecuali mereka “menjual” idealismenya dan bergabung dalam rezim otoriter Soekarno. Tindakan politik yang bersifat oligarkis sangat menonjol, hingga HMI hendak dibubarkan oleh pemerintah beserta Muhammadiyah, kedua ormas ini dituduh sebagai bagian dari Partai Masyumi yang telah dibubarkan pada tahun 1960.

Namun perkembangan politik tidak pernah diprediksi dengan baik, beberapa saat setelah itu, pergolakan dalam tubuh

<sup>5</sup> Untuk ulasan bagaimana peran kelompok Sutan Syahrir dalam perpolitikan Indonesia dan partainya PSI (Partai Sosialis Indonesia [PSI]), lihat J.D. Legge, *Intellectuals and Nationalism in Indonesia: A Study of the Following recruited by Sutan Syahrir in occupation Jakarta*, (New York: Cornell Modern Indonesia Project, 1988)

<sup>6</sup> Untuk watak otoriter Soekarno menurut beberapa sumber muncul sejak tahun 1956, ketiak itu, Soekarno membentuk Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Dewan Nasional, dua lembaga ini tidak dikenal dalam UUDS 1950 yang masih berlaku pada waktu itu, puncak dari sikap otoriter tersebut ketika Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Majelis Konstituante, suatu badan yang diberi tugas untuk merumuskan dasar negara yang baru.



rezim berkuasa sangat terasa, ditandai dengan prahara 30 September 1965 dengan aktor utamanya PKI, saat itulah kaum muda kembali memperoleh momentum untuk bangkit kembali, terbentuklah KAMI, KAPPI, KASI dan lain sebagainya. Setelah Orde Baru terbentuk tahun 1967, gerakan kaum muda ibarat gelombang, kadang mengalami pasang surut, sangat tergantung dengan irama rezim berkuasa, bahkan dalam periode yang panjang ketika mahasiswa diterapkan NKK/BKK tahun 1976, nyaris aktivitas politik kaum muda dibatasi. Dalam kaitan dengan itu, proses rekrutmen politik dilakukan negara terhadap elite-elite kaum muda pada dasawarsa 1970-an dan 1980-an telah membawa organisasi kaum muda dalam wilayah hegemoni dan kooptasi negara. Organisasi kaum muda kemudian dikooptasi dan dihegemoni melalui KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), karena inilah wadah yang sah bagi kaum muda, suara KNPI dianggap sebagai suara kaum muda, kendati dalam kenyataannya, banyak aktivis muda yang memiliki cara pandang yang sangat kontra dengan KNPI pada periode antagonis, periode resipikal kritis dan periode akomodasi antara negara pada satu sisi dan kekuatan sosial keagamaan pada sisi lainnya, khususnya kalangan Islam.

Idealisme politik, apalagi ideologi perjuangan telah tercerabut dalam aktivisme politik kaum muda, mereka yang menjadi elite pada ormas-ormas kepemudaan telah menjelma sebagai agen negara guna melegitimasi kebijakan pemerintah yang berkuasa. Dengan sangat jelas bahwa etika kaum muda dalam berpolitik telah hilang, tidak lagi menjiwai patriotisme kaum muda pra dan awal kemerdekaan, mereka dengan mudah menjadi agen-agen negara

dan bekerja di bawah kooptasi rezim berkuasa. Kaum muda sebagai agen perubahan jelas kehilangan maknanya, demikian pula kaum muda sebagai penerus cita-cita perjuangan telah terperangkap dalam permainan politik yang tidak bermoral. Pada periode tersebut, kasus korupsi, manipulasi dan praktek politik tidak bermoral lainnya sangat dominan, bahkan aktor utama negara membiarkannya sebagai kompensasi politik, kondisi itu setidaknya merupakan hasil dari partisipasi kaum muda.

### **Kaum Muda dan Moralitas Politik Bangsa**

Bagaimana kaum muda semestinya berkiprah dalam politik Indonesia? Lalu konsep etika atau moralitas seperti yang semestinya dimiliki sebagai modal dalam berpolitik? Persoalan etika politik sudah merupakan persoalan universal yang dibicarakan manusia sejak dahulu hingga dewasa ini. Di Indonesia, beberapa daerah memiliki konsep sendiri mengenai etika atau norma-norma sosial yang dikaitkan dengan kekuasaan politik. Norma sosial orang Sulawesi barangkali berbeda dengan norma sosial orang Jawa. Kekuasaan dalam pandangan budaya Jawa sangat tergantung dari keluhuran tingkah laku dan etika sosialnya, ia harus *sepi ing pamrih*, artinya tidak boleh terikat oleh hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan duniawi. Ia harus bersih dari angkara murka supaya dapat menjadi *heneng, hening, hawas, dan heling* (diam, jernih, awas, ingat).<sup>7</sup> Dalam budaya Bima NTB misalnya, kekuasaan diletakkan kepada urusan publik yang luas "Sebagai wakil Tuhan untuk melaksanakan tugas kepemimpinan, ia harus *kawari mataho, kawara weki, kasabua nggahi ro rawi* (kerja yang baik, ingat diri,

<sup>7</sup> Soemarsaid Moertono, "Budi dan Kuasa Dalam Konteks Kesejarahan", dalam Miriam Budiardjo (ed.), *Aneka Pikiran Tentang Kuasa dan Wibawa* (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. 162.

bersatunya ucapan dengan perbuatan).<sup>8</sup> Begitu juga seterusnya dalam budaya masyarakat Indonesia yang lain.

Meski di atas kertas konsep etika itu sangat baik dalam budaya manapun, namun ketika diperhadapkan dengan ekonomi dan kekuasaan politik, konsep yang baik itu akan mengalami pencairan sesuai dan sebangun dengan nilai-nilai yang berlaku dalam bidang ekonomi politik. Max Weber seorang sosiolog misalnya melihat adanya keterkaitan yang erat antara tingkat ketaatan dengan penguasaan ekonomi. Dalam hal ini, ekonomi menjadi domain yang menentukan tingkah laku politik kaum muda, mereka yang ketika masih bebas dari ikatan-ikatan politik tertentu atau belum mencapai posisi kekuasaan akan meneriakkan pentingnya moralitas ditegakkan, namun ketika waktunya mereka berkuasa, justru perilaku politiknya, etika sosialnya dan akhlak pribadinya tidak lebih baik dari mereka yang dahulu dikritiknya.

Sikap skeptis sebagian orang melihat praktek politik yang semakin jauh dari kejujuran dan moralitas dapat dipandang wajar, termasuk sikap apatis warga dalam sejumlah Pilkada di berbagai daerah, kita lihat misalnya, angka Golput pada Pilkada Jawa Barat 33 %, Jawa Tengah 44 %, Sumatera Utara 43 %, Pilkada Jawa Timur putaran I 39,2 % dan putaran II 46 %. Angka golput yang tinggi pada sejumlah Pilkada tersebut menunjukkan tingkat apatis warga terhadap praktek politik yang menyimpang. Mungkin ada benarnya anggapan selama ini yang mengatakan bahwa permainan politik merupakan permainan yang kotor, karena itu politik pantas dijauhi oleh mereka yang tidak siap dengan jenis permainannya, karena mereka yang terlibat di dalamnya bergerak dengan cara-cara yang kurang pantas. Ukuran pantas

atau tidak dalam meraih kekuasaan semakin kabur, karena ruang-ruang perbedaan keduanya semakin tipis. Antara kejahatan dengan berbuat baik sulit dibedakan, barangkali sudah menjadi kelaziman dalam praktek politik yang penuh anomali. Untuk memperebutkan kekuasaan dan jabatan politik, banyak orang yang harus keras, licik, harus pandai main bujuk rayu ataupun mungkin memeras sekalipun. Sementara lawan harus dipukul tanpa ampun dan sahabat yang menjadi terlalu kuat harus dijegal sebelum menjadi ancaman – itu merupakan kelaziman dalam perpolitikan kita saat ini. Politisi hanya mengedepankan pamrih pribadi, golongan dan karib-kerabat, mereka hanya mencari kekuasaan, kekayaan, popularitas, dan penghormatan. Cita-cita dan janji-janji yang pernah disampaikan, kalau suatu saat justru akan menjadi penghalang bagi kelangsungan kekuasaan, kekayaan, dan popularitasnya, akan segera dikorbankan.

Kaum muda pun dalam beberapa kontestasi politik pasca Orde Baru memiliki kecenderungan pada kekuasaan oligarki semakin tampak, idealisme sebagai kaum muda sudah kehilangan magnetnya untuk membawa perubahan politik, sementara pragmatisme politik semakin menonjol. Sebagian kaum muda melakukan transmisi ke beberapa partai politik dengan cita-cita yang tidak tunggal, umumnya mengharapkan legitimasi kekuasaan. Berkaitan dengan legitimasi ini, menurut Max Weber terdapat tiga model yakni; *pertama*, legitimasi tradisional, yaitu keyakinan dalam suatu masyarakat tradisional, bahwa pihak yang menurut tradisi lama memegang pemerintahan memang berhak untuk memerintah, misalnya kaum bangsawan atau keluarga raja (dinasti), dan bahwa oleh karena itu memang sudah sepatutnya apabila pihak itu ditaati.

---

<sup>8</sup> Lihat Syarifuddin Jurdi, *Islam, Masyarakat Madani dan Demokrasi di Bima*, (Yogyakarta: CNBS, 2007)

*Kedua*, legitimasi kharismatik berdasarkan perasaan kagum, hormat, cinta atau *ngeri* masyarakat terhadap seorang pribadi yang sangat mengesankan sehingga mereka dengan sendirinya bersedia untuk taat kepadanya; misalnya kalau seseorang dianggap mempunyai suatu perutusan khusus atau kesaktian. *Ketiga*, legitimasi rasional legal berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seseorang pemimpin.<sup>9</sup>

Anomali praktek politik Indonesia mengindikasikan adanya kesenjangan antara apa yang dijanjikan dan dicita-citakan dengan praksis politik, karena anomali politik tersebut tidak saja dilakukan oleh mereka yang rendah basis intelektual dan spiritualnya, tetapi juga dilakukan oleh politisi dengan basis intelektual dan spiritual yang memadai, bahkan mengakar kuat dalam aktivitas akademik dan kegiatan keagamaan.<sup>10</sup> Dalam konteks ini, politik Indonesia telah identik dengan praktek dan permainan yang kotor, kini permainan kotor itu terdesentralisasi ke berbagai daerah.

Dinamika politik yang semakin mengukuhkan praktek yang tidak bermoral tersebut memerlukan adanya energi baru yang positif untuk merekonstruksi permainan politik agar lebih anggun, santun dan beradab. Kaum muda perlu mengambil prakarsa dalam mengubah citra politik bangsa, tahun 2009 dapat menjadi momentum kemunculan kaum

muda dalam pentas politik nasional, dengan catatan harus membawa energi baru yang positif bagi perbaikan bangsa. Wacana kepemimpinan kaum muda yang mencuat beberapa waktu yang lalu dapat menjadi suatu catatan penting bagi kaum muda dalam merencanakan bentuk keterlibatannya dalam politik. Ingat, politik tidak identik dengan masuk partai, masuk birokrasi, masuk lembaga-lembaga negara, tetapi politik dapat dilakukan dengan cara-cara yang bersifat edukatif, mendesain program pemberdayaan rakyat dan mewujudkan sistem kelembagaan *civil society* yang mandiri dan kuat.

Dengan mengambil prakarsa pada berbagai ranah kehidupan, kaum muda dapat sebagai alternatif kekuatan *civil society* dalam rangka merespons sejumlah distorsi sosio politik bangsa, mulai dari persoalan klasik berupa korupsi hingga persoalan manipulasi. Dahulu korupsi yang telah menggurita bangsa ini dilakukan secara konvensional, kini modus politik amoral itu dilakukan dengan cara-cara yang lain seperti pengadaan barang dan jasa atau modus lainnya. Distorsi politik bangsa sebagai akibat kerakusan para elite berkuasa dan inilah yang menjadi dasar keterlibatan kaum muda dalam mencita-citakan serta menciptakan praktek politik yang bermoral.

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo (ed.), *Aneka Pikiran Tentang Kuasa dan Wibawa* (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm.15.

<sup>10</sup> Untuk beberapa kasus dapat disebutkan disini yang berkaitan dengan praktek korupsi para elite intelektual atau mereka yang memiliki pemahaman keagamaan yang kuat, misalnya kasus korupsi yang melibatkan Prof. Dr. Nazaruddin Syamsuddin, Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, dan Dr. Mulyana W. Kusuma (KPU); kemudian kasus yang menimpa mantan menteri agama Prof. Dr. Said Agil Husein al-Munawar (Dosen UIN Jakarta, aktivis atau elite NU); Prof. Dr. Romli yang sempat masuk dalam tahanan yang kemudian kasusnya divonis bebas oleh pengadilan tingkat banding. Juga penting untuk dimasukkan di sini adalah kasus yang menimpa Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang dikaitkan dengan kasus Sisminbakum di Kementerian Hukum dan HAM, kasus Yusril Ihza Mahendra hingga kini belum jelas keberlangsungannya, apakah kasus ini murni persoalan hukum ataukah ini merupakan persoalan politik. Tentu tidak mudah menjawab pertanyaan ini, oleh karena motif politik di balik kasus ini sangatlah kuat sebagaimana dikatakan oleh Yusril sendiri maupun oleh saksi yang meringankan seperti Mantan Wapres M. Jusuf Kalla, Mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie dan tokoh-tokoh lainnya.

## Etika Politik Bangsa dan Peran Kaum Muda

Perubahan politik bangsa hanya mungkin dilakukan dengan meningkatkan pendidikan politik rakyat, tanpa itu, cita-cita menciptakan politik yang sehat dan demokratis masih jauh dari harapan. Apabila individu terpilih yang mewakili rakyat dalam parlemen 2009 mendatang bukanlah individu-individu yang unggul, tidak memiliki visi merubah bangsa menjadi lebih baik, dan sebagainya, maka wajah politik Indonesia tetap dipenuhi oleh aktor-aktor yang rendah kualifikasi moral. Kita memerlukan aktor-aktor politik yang memiliki kelebihan dalam hal ilmu pengetahuan, memiliki akhlak dan moral yang baik (berbudi pekerti yang luhur), dapat diteladani, dapat menjadi sumber sosialisasi nilai-nilai kebaikan, antara ucapan atau tutur kata dengan perbuatannya tidak terdapat kesenjangan. Kaum muda yang masuk dalam kekuasaan harus membekali diri dengan nilai-nilai moralitas yang baik.

Era politik Indonesia kalau diklasifikasi dapat ditemukan dalam pola berikut; *pertama*, kepemimpinan periode awal Indonesia (1945-1966) didominasi oleh aktivis gerakan dan ilmuwan yang merupakan hasil didikan Belanda, ada perpaduan antara aktivisme dan intelektualisme dalam memimpin bangsa. *Kedua*, kepemimpinan periode 1967-1998 didominasi oleh militer, teknokrat dan akademisi. Pusat kekuasaan berada dalam kendali militer dengan dukungan kuat dari para loyalis rezim untuk mendukung kepemimpinan militer. *Ketiga*, kepemimpinan dalam kendali aktivis dan intelektual pada pemerintahan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati. Periode ini terjadi

proliferasi kekuasaan, presiden tidak lebih kuat dari lembaga lainnya. dan *ke-empat*, kepemimpinan dalam kendali para pengusaha yang melakukan transmisi ke berbagai partai politik dan kemudian mengendalikan partai. Terpilihnya Jusuf Kalla pada 2004 sebagai ketua umum Golkar serta Surya Paloh<sup>11</sup> dan Aburizal Bakri<sup>12</sup> sebagai ketua Dewan Pembina dan anggota, kemudian terpilihnya Sutrisno Bachir sebagai ketua umum PAN, dan masuknya sejumlah pengusaha di partai-partai besar (PD, PDIP, PKB, PPP, PKS dll) serta partai baru seperti Gerindra menunjukkan bahwa kendali kekuasaan berada dalam kontrol para pengusaha.

Kaum muda akan menghadapi dua kekuatan besar dalam memainkan peran-peran politiknya; *pertama*, kekuatan ekonomi yang memanfaatkan transisi politik untuk mempermudah akses bisnis mereka pada proses pengambilan kebijakan. Kekuatan ekonomi dapat “melunakkan” sejumlah idealisme kaum muda, bahkan suatu keniscayaan akan terjerumus dalam pragmatisme politik, alih-alih mau membangun etika dan moral politik, justru yang terjadi sebaliknya. *Kedua*, kekuatan politik global yang ikut menentukan arah demokrasi bangsa, pencampuran kekuatan – reformis dan status quo menjadi kabur, bahkan partai-partai reformis telah disusupi oleh politisi kutu loncat, termasuk politisi muda.

Untuk mengantisipasi dua kekuatan itu, kaum muda harus hadir sebagai individu yang memiliki karakter dan kepribadian yang unggul, menghindari permainan politik yang tidak bermoral, secara sungguh-sungguh dan konsisten menegakkan prinsip *al-amar bil-ma'ruf*

<sup>11</sup> Pada tanggal 2 Februari 2010, Surya Paloh dan Sri Sultan Hamengkubuwono mendeklarasikan Gerakan Nasional Demokrat sebagai ormas bersama sejumlah aktifis gerakan sosial, termasuk politisi, sebagian kalangan memprediksi gerakan yang dideklarasikan Surya Paloh akan bermetamorfosis menjadi partai politik.

<sup>12</sup> Pada Munas Golkar di Pekanbaru pada bulan Oktober 2009, Abu Rizal Bakri terpilih sebagai ketua umum Golkar menggantikan Jusuf Kalla, mengalahkan rivalnya Surya Paloh.



*wan-nahyu anil munkar*. Kaum muda perlu menunjukkan kualitas diri bahwa mereka memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan dari dalam struktur negara dan memangkas habis sistem yang korup.<sup>13</sup> Dengan cara demikian, etika dan moral politik yang unggul dalam sistem politik demokratis akan dapat diwujudkan. Ini bukan gagasan revolusioner, tetapi gagasan rasional yang dapat dikerjakan dan dilakukan oleh kaum muda guna berperan serta dalam menata struktur politik, sistem sosial dan budaya masyarakat agar lebih egaliter dan demokratis. Sistem patronase yang selama ini bahkan hingga saat ini masih dianut oleh sebagian masyarakat harus segera dipangkas habis.

Peran kaum muda akan lebih klop apabila mampu menjaga keseimbangan dirinya, menjaga komitmen dirinya, dan menjaga konsistensi dengan menyatunya antara perkataan dan perbuatan (tutur-kata dan perilaku), mereka menyampaikan apa yang dianggap sebagai sesuatu yang benar dan bertindak atas dasar kebenaran itu. Pemimpin muda yang visioner adalah pemimpin yang dalam dirinya terdapat esensi kepemimpinan yang bersifat integratif, artinya pemimpin muda perlu memiliki kesatuan pandangan mengenai agama, kehidupan sosial, kehidupan politik kenegaraan, ekonomi, hukum, dan budaya. Pemimpin muda yang unggul dalam soal agama, unggul dalam pemikiran tentang politik, tata negara, ekonomi, hukum, manajemen dan peradaban atau dapat kita sebut sebagai tipe pemimpin ideal dengan sendirinya akan membawa implikasi bagi rekonstruksi

apa yang selama ini dinilai benar secara politik oleh sebagian orang, ternyata suatu penyimpangan dalam arti sesungguhnya menurut ukuran kebenaran.<sup>14</sup>

### **Bagaimana dengan Etika Politik Lokal di Berbagai Daerah?**

Praktek politik di sejumlah daerah masih bersifat “tradisional dan patronase”, kebenaran simbolik yang diucapkan oleh elite berkuasa seringkali menjadi rujukan. Disinilah kita harus mengkritisi makna kepemimpinan dalam masyarakat lokal. Pemimpin yang benar adalah pemimpin yang tingkah lakunya tidak menyimpang dari “poros” kebenaran yang berlaku umum di masyarakat (baca: agama dan budaya), pemimpin yang menjunjung tinggi moralitas (akhlak), pemimpin yang senantiasa berbuat adil, pemimpin yang menyejukkan dan pemimpin yang membahagiakan mereka yang dipimpin. Suatu komunitas menjadi “sakit” selalu saja relevan dengan konteks kepemimpinan, bahwa mereka menjadi “sakit” bukan karena mereka tidak berbuat sesuatu agar “penyakitnya” sembuh, tapi sakitnya suatu masyarakat lebih disebabkan oleh faktor kepemimpinan. Sikap apatis dan gerakan perlawanan secara laten seringkali menjadi pilihan sebagian orang untuk memprotes model kepemimpinan yang tidak aspiratif, tidak peka terhadap fenomena sosial rakyatnya dan mengingkari janji-janji politiknya.

Persoalan utama yang dihadapi rakyat di berbagai daerah sebenarnya adalah persoalan kepemimpinan yang tidak mampu memberikan jawaban atas anomali budaya

<sup>13</sup> Untuk menyebut beberapa nama kaum muda yang kini muncul di pentas nasional seperti Dr. Anis Baswedan, Dr. Yudi Latif, Dr. Firmanzah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mereka ini diharapkan dapat menjadi aktor yang mampu menjaga etika dan moralitas politik kaum muda, tidak terjebak pada permainan politik kaum elite.

<sup>14</sup> Tindakan para politisi dan birokrat yang melakukan penggelambungan harga barang misalnya atau memanfaatkan uang rakyat untuk kepentingan diri dan koleganya dapat dikonstruksi kembali bahwa perbuatan itu salah dan menyimpang.

dan transisi nilai-nilai “tardisional” ke nilai-nilai “materialisme-konsumerisme”, bahkan pemimpin dalam arti simbolik ini terjebak dalam perbuatan anomali tersebut. Semula mereka merupakan tumpuan harapan rakyat, melalui merekalah perubahan dapat dilakukan dan pembangunan segera direalisasikan dengan bersandar pada nilai-nilai kebudayaan dan identitas bangsa. Masyarakat daerah tanpa sadar telah terjebak dalam poros perubahan yang tak terkendali, terlalu mahal ongkos sosial politik dan budaya yang ditanggung generasi mendatang atas keterpurukan moral masyarakat saat ini, hanya karena pemenuhan kepentingan sekelompok elite berkuasa, rakyat menjadi korban.

Visi bangsa masa depan yang beradab demokratis hanya ada dalam lembaran negara dan kebijakan pemerintah daerah dan “khutbah-khutbah” moral elite-elite politik, tetapi tidak mampu menjadi kenyataan dalam praktek politik. Ruang-ruang keikhlasan dan kejujuran yang diharapkan rakyat telah tertutup oleh kepentingan-kepentingan ekonomi politik yang bersifat jangka pendek. Mereka tidak lagi mewarisi ketulusan, kebenaran, keikhlasan dan keadilan sebagaimana yang dicontohkan oleh para pendahulunya. Apabila melihat model kepemimpinan yang ada, setidaknya terdapat tiga kecenderungan yaitu *pertama*, diversifikasi kepemimpinan, kalau dulu kita memerlukan kepemimpinan politik dan agama dalam arti sempit, maka sekarang kita perlu memperluas horison pemikiran kita di bidang ilmu, teknologi, ekonomi, budaya, dan lain-lain. *Kedua*, desentralisasi, perluasan makna kepemimpinan bukan lagi hanya kepemimpinan nasional melainkan telah menyebar kemana-mana. *Ketiga*,

proliferasi, kepemimpinan yang tidak hanya di bidang politik, tetapi menyebar kemana-mana.<sup>15</sup> Tiga kecenderungan tersebut tidak ditemukan dalam praktek politik masyarakat. Generasi muda yang menjadi kekuatan lapis menengah pun telah terjerumus ke dalam permainan politik yang sangat pragmatis.

Dilema moral pemimpin bangsa (pusat-daerah) merupakan manifestasi dari dilema moral manusia secara keseluruhan. Klaim masyarakat sebagian masyarakat daerah sebagai masyarakat yang religius-Islami (baca: Perda syariah di sejumlah daerah) tampaknya hanya bersifat simbolik semata dan bahkan itu hanya klaim politik yang tidak memiliki landasan empiris dalam praktek politik masyarakat, kalangan tua maupun muda telah dihindangi dengan penyakit “haus kekuasaan”, entah berapa lama lagi, proses sosial yang diperlukan untuk memperoleh pemimpin yang memiliki kelebihan-kelebihan dan keunggulan-keunggulan tertentu bila dibandingkan dengan yang lain, memiliki otoritas besar bila dibandingkan dengan “pengikut”nya, pemimpin yang berhubungan dengan tugas-tugas mulia membina, membimbing dan mengarahkan rakyat atau pemimpin yang akan menentukan jalannya perubahan menuju masyarakat yang *baladun thoyyibatun warabbun ghafur* begitulah semboyan sebagian politisi Islam era 1950-an.

Pemimpin yang diharapkan masyarakat dalam periode transisi saat ini adalah pemimpin yang memiliki keistimewahan dan keunggulan yang bersifat komparatif – perilaku, ucapan, perbuatan dan sebagainya selalu mencerminkan keunggulan dirinya. Disebut pemimpin, karena ia memiliki keteladanan dan keterpaduan antara tutur-kata dan perbuatan. Sebagai

<sup>15</sup> Lihat Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia* (Yogyakarta: Shalahuddin Press dan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 99

pemimpin, ia dihargai dan dihormati di segala zaman, oleh berbagai generasi dan bahkan setelah ia tiada pun di dunia ini, ia selalu diingat dan dikenang, karena jasa-jasa baiknya, karena kepribadian-nya, karena pemikirannya, dan karena keteladanannya.

Di berbagai daerah, belum muncul sosok pemimpin dalam bidang politik pemerintahan yang benar-benar diharapkan rakyat membawa pada perbaikan, yang ada di Bima barulah kumpulan pejabat, dan bukanlah pemimpin. Kalau mereka disebut pemimpin haruslah kepemimpinannya itu diuji oleh sejarah. Banyak orang setelah selesai dalam posisi jabatannya, justru tidak dihargai dan dihormati oleh “bekas” bawahannya, ia dihormati dan dihargai, karena posisi jabatannya, bukan karena kepribadian atau sikap dan perilaku yang ditunjukkan, sejatinya ia bukanlah pemimpin, melainkan pejabat. Meski demikian, masih merupakan sesuatu yang memang sulit untuk membedakan antara pemimpin dan pejabat, secara umum mereka yang menduduki posisi jabatan dalam politik pemerintahan – identik sepenuhnya dengan pemimpin, artinya makna esensi seorang pemimpin telah mengalami reduksi, sebab pada prinsipnya pemimpin bukan karena jabatan yang melekat dengan dirinya tetapi karena moral atau akhlaknya, atau dengan kata lain – seorang pemimpin memiliki konsistensi antara visi kepemimpinannya dan tingkah laku jujurnya, kesatuan antara mulut dengan perbuatan. Itulah yang mengantar dan melegitimasi mereka menjadi pemimpin sejati. Terdapat perbedaan yang tajam antara “keabadian” makna seorang pemimpin dengan kesementaraan makna temporal seorang pejabat.<sup>16</sup>

Dalam masyarakat Indonesia, legitimasi pemimpin adalah legitimasi moral, legitimasi akhlak, legitimasi kejujuran dan legimitasi keadilan dalam bertindak, mereka menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya dan mereka bukanlah manusia yang memiliki sifat-sifat buruk misalnya melakukan korupsi atau penyelewengan uang rakyat, apalagi menyalahgunakan posisi jabatannya. Dia menjadi pemimpin dalam kata dan tindakan, memiliki harga diri yang tinggi dan bermartabat, itulah pemimpin ideal yang didambakan oleh masyarakat. Namun sangat disayangkan lemahnya komitmen moral dan kejujuran dalam diri mereka yang kini berkuasa, ucapan dan perbuatannya memiliki kesenjangan yang sangat tajam. Visi mereka pun sangat pragmatis, tidak visioner dan sulit memecahkan problem sosio budaya yang sudah mengalami distorsi dan tercerabut dari nilai-nilai kemanusiaan.

Kaum muda harus muncul sebagai alternatif pemecah masalah dan bukan menjadi sumber persoalan baru. Dengan idealisme dan visi masa depannya, harus mengembalikan nilai-nilai budaya bangsa yang telah hilang tanpa meninggalkan kecenderungan perubahan pada ranah global. Visi yang baik harus didukung oleh tingkah laku yang terpuji dan akhlak sosial politik yang mencerminkan visi tersebut. Perlu memegang komitmen dalam berjuang dan konsisten dalam tindakan dan ucapan.

## Penutup

Pemimpin masyarakat di daerah, pemimpin yang melekat dalam diri elite berkuasa harus memiliki sejumlah nilai-nilai kejujuran, berakhlak mulia dan lebih dari itu – dalam diri seorang pemimpin

---

<sup>16</sup> Mudji Sutrisno, “Mencari Pemimpin Sejati”, dalam Tim Maula, *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani Dalam Kultur Feodal* (Bandung: Pustaka Hiadfayah, 1999), hlm. 79-80

ada konsistensi antara apa yang dituturkan dengan tingkah laku sosialnya. Sementara mereka yang menduduki posisi jabatan – baik dalam pemerintahan ataupun dalam struktur birokrasi lainnya, boleh jadi meneladani makna kepemimpinan diatas, tetapi dalam banyak kasus, para pemimpin temporal yang menduduki jabatan politik dan pemerintahan, hanya berhenti pada masa jabatannya. Penghargaan dan penghormatan rakyat dan bawahannya terjadi pada waktu mereka memegang posisi jabatannya. Tidak sedikit dari mereka yang menduduki jabatan politik harus berakhir dengan dramatis dalam posisi kekuasaannya. Mereka tidak seperti Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, Agus Salim, Tjokroaminoto, Soekarno, Hatta, Natsir, Buya Hamka, dan sebagainya, baik mereka masih hidup maupun sudah meninggal, spirit moral perjuangannya masih diingat dan diteladani oleh para pengikutnya.

Dinamika politik dan kepemimpinan dalam masyarakat masih mewariskan tradisi masyarakat feodal, masyarakat tidak dibimbing untuk menuju pada

kemajuan, tetapi dibodohi, bahkan ditipu oleh mereka yang berkuasa ataupun mereka yang hendak merebut kekuasaan, masyarakat hanya menjadi sarana mobilisasi kepentingan elite-elite berkuasa, setelah berkuasa, rakyat dicampakkan, janji-janji politik diabaikan. Ini merupakan praktek politik yang anomali dalam sistem politik yang sudah semakin demokratis.

Atas dasar itulah, kita memerlukan pemimpin sejati yang menjadi panutan umat, pemimpin yang ucapannya didengar oleh umat dan mereka taat dalam mengikuti ajakan sang pemimpin. Semoga mereka yang sedang menuju pada “kursi” sebagai pemimpin dapat mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang pernah terjadi. Semoga mereka yang belum mampu mengendalikan syahwat kekuasaannya dapat segera insaf untuk berbalik haluan menjadi orang-orang yang tunduk dan taat kepada ajaran agama, nilai-nilai budaya dan bakat kepemimpinan yang dimiliki segera dioptimalkan untuk kepentingan umat, bangsa dan negara yang tidak bermakna sempit, tidak disekat oleh kelompok dan sekat-sekat sektarian.



## **Bacaan**

Ingleson, John, 1982, *Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*, Jakarta, LP3ES

Kuntowijoyo, 1994, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Yogyakarta, Shalahuddin Press & Pustaka Pelajar

Legge, J.D., 1988, *Intellectuals and Nationalism in Indonesia: A Study of the Following Recruited by Sutan Syahrir in Occupation Jakarta*, New York, Cornell Modern Indonesia Project

Sutrisno, Mudji, 1999, "Mencari Pemimpin Sejati", dalam Tim Maula, *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani Dalam Kultur Feodal*, Bandung, Pustaka Hiadfayah

Mulkhan, Abdul Munir, 1994, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, Yogyakarta, Sipres.

Soemarsaid Moertono, 1984, "Budi dan Kuasa Dalam Konteks Kesejarahan", dalam Miriam Budiardjo (ed.), *Aneka Pikiran Tentang Kuasa dan Wibawa* Jakarta, Gramedia..

## **Majalah**

*Tempo edisi khusus, edisi 11-17 Agustus 2008*